

Rabu, 11 Oktober 2023



Nama : Feni Zulfa Nurkheliza
NPM : 2252011201
Matakul : Hukum Ekonomi dan Bisnis
"UTS"
Dosen : Siti Nurhasanah, S.H., M.H.

1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan bagaimana menurut pendapat sdr tentang pernyataan tsb.
2. Bentuk perusahaan yang memperoleh pengesahan
 - a. Perseroan terbatas (PT) oleh ...
 - b. Koperasi oleh ...
 - c. Perum dan persero oleh ...
 - d. Yayasan oleh ...
3. Pembubaran pada PT harus didahului dengan apa dan oleh siapa.
4. Tuliskan organ dan kedudukan daripada PT dan turunkan perbedaan antara PT dengan PT.TBK
5. Apakah yang dimaksud dengan legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh perusahaan, dan apa yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memiliki legalitas.

6. *Zulfa*
jawab.

1. Hukum bisnis merupakan ^{sistem} hukum perusahaan.
menurut saya sesuai karena secara substansi ~~he~~ ruang lingkup hukum perusahaan itu adalah hukum bisnis (business law). Jadi hukum perusahaan lebih luas lingkup bidang pengaturannya sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi.
2. a. Perseroan terbatas (PT) memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
b. Koperasi oleh Menteri Koperasi
c. Perum oleh Menteri BUMN, dan Persero oleh Menteri Kehutanan

Sistem Administrasi Badan Hukum.

d. Yayasan oleh Menteri Kehakiman

3. Pembubaran PT didahului dengan likuidasi oleh likuidator atau kurator

a. organ dan kedudukan PT.

- organ :
 - a. Rups, badan tertinggi PT
 - b. Direksi, memimpin dan mengurus PT
 - c. Dewan Komisaris, pengawas PT
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rups.

• kedudukannya sebagai bentuk badan hukum perseroan modal

• perbedaan PT dan PT. Tbk terletak pada modal

PT. Persekutuan modal berbasis atas saham yang sll/paling sedikit 5% dimiliki negara

PT. Tbk modal dasar seluruhnya berbasis atas saham

5. legalitas perusahaan ~~peru~~ adalah badan usaha yang berfungsi sebagai organisasi menjalankan kegiatan usaha, seperti PT, koperasi, persero, perum, firma, CV.

→ 5 dokumen yang wajib dimiliki

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Nama Perusahaan
3. legalitas operasional usaha
4. Tanda daftar usaha perdagangan (TDUP)
5. Surat izin usaha perdagangan

→ yang akan menjadi perusahaan tidak memiliki legalitas maka perusahaan gbs telah digatuh hukum pelanggaran tkt dan/atau pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.